STUDI KASUS: DAMPAK DAN SOLUSI KURANGNYA GURU PENDIDIKAN PANCASILA LINIER DI MTs NEGERI 1 TASIKMALAYA

Muhammad Rusydan Abdul Hadi¹, Kokom Komalasari², Nisrina Nurul Insani³
muhammadrusydana13@upi.edu¹, kokom@upi.edu², nisrina.n.i@upi.edu³
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak dan solusi dari kurangnya guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang linier di MTs Negeri 1 Tasikmalaya. Pendekatan dari penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila berdampak pada rendahnya penguasaan materi, metode pembelajaran yang monoton, serta rendahnya kualitas Pendidikan Pancasila. Adapun solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan kompetensi guru non-linier melalui pelatihan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), penguatan minat terhadap studi PPKn sejak dini, serta dorongan kepada lembaga pendidikan tinggi untuk memperluas program studi Pendidikan Pancasila. Penelitian ini menegaskan pentingnya keberadaan guru linier dalam menjamin kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Kata Kunci: Guru, Pendidikan Pancasila, Studi Kasus, Dan Proses Pembelajaran.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen yang esensial dan tidak terpisahkan dari kehidupan setiap individu. Menurut John Dewey (1916) dalam bukunya *Democracy and Education* menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses sosial yang bertujuan untuk menyiapkan individu agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak semata-mata mengutamakan aspek kognitif, melainkan juga berperan dalam membentuk karakter serta mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman (Dewey, 1916). Tilaar (2012) juga menyebutkan pendidikan merupakan suatu alat penting dalam misi perubahan sosial yang dapat meningkatkan kualitas manusia menuju kemajuan bangsa. Negara Indonesia mengatur pendidikan ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didefinisikan oleh sebagai "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara". Dalam penerapannya, sistem pendidikan terdiri atas tiga jalur utama, yakni pendidikan formal, non formal, dan informal (Sya'adah, 2022).

Sekolah menjadi salah satu pilar pendidikan formal yang diwajibkan oleh pemerintah untuk diikuti. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas diatur bahwa masyarakat harus melaksanakan wajib belajar selama 12 tahun mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelaksanaan pendidikan di sekolah tidak terlepas dari berbagai komponen yang ada di dalamnya seperti kurikulum, mata Pelajaran, guru, dan komponen lainnya yang mendukung keberhasilan peserta didik. Perubahan menjadi lebih baik dari segi karakter, pengetahuan, dan keterampilan menjadi target utama sekolah dalam pembelajaran. Dalam hal ini guru memiliki peran penting sebagai guru untuk mewujudkan orientasi peserta didik menjadi lebih baik. Guru harus menjadi sosok panutan atau teladan bagi peserta didiknya (Yestiani & Zahwa, 2020).

Adanya tuntutan kepada guru menjadi tanggung jawab berat yang harus diemban demi melaksanakan misi mulia itu. Guru merupakan seorang guru yang memiliki tanggung jawab moral dalam membentuk kepribadian peserta didik. Guru harus mampu menjadi teladan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Driyarkara, 2006). Dalam mewujudkan hal tersebut tentu guru harus memiliki kompetensi yang dapat mendukung keberhasilan peserta didik dalam belajar. Kompetensi guru adalah kombinasi dari kemampuan personal, akademik, teknologi, sosial, dan spiritual yang berperan dalam membangun profesionalisme seorang pendidik. Kompetensi ini mencakup penguasaan materi pelajaran, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang edukatif, pengembangan diri, pemahaman karakteristik peserta didik, serta sikap profesional dalam menjalankan tugas (Febriana, 2021). Guru diklasifikasikan dalam berbagai kriteria, antara lain kualifikasi akademik, kompetensi, dan peran dalam lingkungan pendidikan. Guru harus memiliki empat kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (Jahidi, 2013). Empat kompetensi itu diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen. Dalam kompetensi profesional, guru harus menguasai materi pelajaran secara mendalam berkaitan dengan mata Pelajaran yang diampunya.

Salah satu mata Pelajaran yang wajib di sekolah bahkan sampai perguruan tinggi yaitu Pendidikan Kewarganegaraan atau sekarang dikenal dengan istilah Pendidikan Pancasila. Mata Pelajaran ini wahana pembelajaran demokrasi yang dapat menjadi solusi dalam membangun infrastruktur yang menunjang terwujudnya keberhasilan demokrasi dalam suatu negara (Mufidah, 2020). Selain itu, Pendidikan Pancasila ini memiliki cakupan yang sangat luas dan universal tidak hanya mencakup di sekolah saja, tapi mencakup *community civics* yang intinya membahas terkait hubungan antara warga negara dengan pemerintah dalam berbagai aspek seperti pembahasan terkait demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil (Hamdani, 2021., Rahayu., 2007). Mata pelajaran ini terbukti memiliki peran penting dalam pendidikan karena lebih menitikberatkan pada aspek afektif atau pembentukan karakter, di samping pengembangan kemampuan kognitif. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan guru yang kompeten

Dalam pelaksanaan dan implementasi peran guru di sekolah tidak lepas dari berbagai tantangan dan masalah. Masalah yang sering terjadi yaitu kurangnya guru yang berkompoten dan berkualitas. Masalah tersebut dapat muncul karena kurangnya lulusan dari mata Pelajaran yang linier dengan apa yang dipelajari sekarang. Banyak guru yang mengajar mata Pelajaran yang bukan bidangnya atau tidak sesuai dengan lulusan jurusan yang ia tekuni. Masalah tersebut dapat menjadi penting karena berkaitan dengan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Masalah tersebut terjadi di MTs Negeri 1 Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa, Sukarapih, Kec. Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Masalah tersebut tentu memberikan dampak baik itu bagi peserta didik ataupun bagi pendidiknya itu sendiri. Penyebab dari permasalahan ini pun harus diketahui agar masalah ini dapat diberikan Solusi yang tepat.

Latar belakang pendidikan atau jurusan yang beragam menjadi salah satu problem dalam pembelajaran. Hal tersebut selaras dengan penelitian Ena Suma dan Yeni Nurpatri (2022) pada bidang ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan menjadi salah satu problem dari guru yang sangat tinggi yaitu sebesar 60%. Dalam penelitian tersebut problema latar belakang guru dapat mempengaruhi kepada pembelajaran dan kreativitas peserta didik karena berkaitan dengan Tingkat penguasaan guru dalam mengajarkan materi. Kebaruan dari penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait dengan dampak dan Solusi atas permasalahan kurangnya guru yang linier atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Penulis akan memfokuskan penelitian di daerah MTs Negeri 1 Tasikmalaya terkait dengan masalah tersebut dan bagaimana dampak serta solusi

dari masalah kurangnya guru Pendidikan Pancasila di sekolah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan usaha untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi yang valid dan benar terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti dengan cara-cara ilmiah (Siroj, 2024). Secara umum, pendekatan kualitatif dipahami sebagai jenis penelitian yang menghasilkan temuan bukan melalui analisis statistik, melainkan melalui pemahaman mendalam terhadap makna suatu peristiwa. Pendekatan ini tepat digunakan ketika permasalahan yang diteliti belum jelas atau masih kompleks. Tujuan peneliti adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika situasi sosial yang rumit. Selain itu, metode ini juga bermanfaat dalam membangun pemahaman atas fenomena sosial, serta merumuskan hipotesis maupun teori berdasarkan realitas di lapangan (Sugiono, 2016).

Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kasus yaitu suatu pendekatan yang meneliti secara mendalam suatu objek atau fenomena tertentu dalam jangka waktu dan konteks kegiatan tertentu, seperti peristiwa, program, proses, institusi, atau kelompok sosial. Beragam teknik pengumpulan data digunakan selama periode tersebut untuk memperoleh informasi secara komprehensif (Kusmarni, 2012). Tujuan dari jenis penelitian ini untuk memahami secara mendalam terkait dengan konteks kasus, dinamika, faktor, dan juga dampak dari adanya kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan instrumen studi literatur untuk mencari data yang dibutuhkan melalui sumber pustaka atau dokumen (Melfianora, 2019). Sumber literatur didapatkan dari artikel dan penelitian sebelumnya. Selain itu, pencarian data dan fakta dilakukan melalui wawancara kepada peserta didik dan guru. Observasi langsung juga dilakukan untuk memperkuat data dan fakta di lapangan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dan diuraikan dalam bagian pembahasan guna menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran guru yang berkompeten menjadi syarat utama dalam menjamin keberhasilan dan mutu pembelajaran peserta didik. Guru yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan pendidikannya menjadi tantangan tersendiri dan menjadi permasalahan di beberapa daerah salah satunya di MTs Negeri 1 Tasikmalaya. Sekolah tersebut sangat terkenal di Tasikmalaya dan dinobatkan sebagai sekolah nomor satu. Berdasarkan data terbaru jumlah peserta didik di MTs Negeri 1 Tasikmalaya sekitar 1300 orang. Sekolah ini menjadi favorit dan unggul dalam hal prestasi baik akademik ataupun non akademik. Namun, permasalahan terkait dengan guru yang berlatar belakang berbeda dengan pendidikannya atau non linier menjadi masalah yang belum bisa diatasi salah satunya dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru Pendidikan Pancasila di sekolah tersebut yaitu Ibu Devi, beliau mengatakan bahwa guru Pendidikan Pancasila yang merupakan lulusan asli hanya satu orang saja. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan pencarian data di Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang menunjukkan bahwa hanya ada 5 guru Pendidikan Pancasila di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 14 sekolah. Dari data tersebut permasalahan ini bukan hanya terjadi di MTs Negeri 1 Tasikmalaya semata, tapi di sekolah-sekolah lain pun mengalami masalah yang sama terkait dengan kurangnya lulusan PPKn. Data itu juga menunjukkan ketimpangan antara jumlah peserta didik dan jumlah lulusan guru yang tersedia. Hal tersebut tentunya memberikan dampak bagi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Adanya kekurangan guru linier tersebut tentu membuat sekolah menugaskan guru yang tidak memiliki latar belakang PPKn. Banyak guru yang memiliki latar belakang

PJOK, Bahasa Indonesia dan IPS.

Adanya masalah kekurangan guru Pendidikan Pancasila terjadi di beberapa daerah yang umumnya disebabkan oleh kebutuhan akan tenaga pengajar di berbagai daerah, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), sering kali tidak sebanding dengan jumlah guru yang memiliki kualifikasi sesuai bidang studi. Karena keterbatasan tersebut sekolah menugaskan guru dari mata pelajaran lain untuk mengajar Pendidikan Pancasila (Darmawan, 2020). Selain itu, anggapan terhadap mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang dapat diajarkan oleh siapapun sudah menjadi anggapan umum di masyarakat sehingga pelajaran tersebut dianggap tidak penting dan dapat diajarkan oleh siapa saja. Kemudian faktor lainnya yaitu pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang masih belum merata dan menjadi kendala. Hal ini menyebabkan masih banyak guru mengajar tanpa sertifikasi dan pelatihan pedagogik yang memadai (Harahap, Sintia, & Siagian, 2024). Dampak dari masalah tersebut tentu tidak boleh dibiarkan dan harus diberikan solusi terbaik.

A. Dampak kurangnya guru linier Pendidikan Pancasila di MTs N 1 Tasikmalaya

Peran guru sangatlah penting dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah bahkan kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas pengajarnya. Kekuatan dan mutu pendidikan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru sebagai faktor utama (Surakhmad, 2004). Ketika seorang guru Pendidikan Pancasila bukan lulusan asli PPKn, maka proses pembelajaran akan mengalami berbagai hambatan, baik dari aspek kompetensi pedagogik, substansi materi, maupun nilai-nilai karakter yang seharusnya ditanamkan. Salah satu dampak utama kurangnya guru linier dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila adalah menurunnya kualitas penguasaan materi oleh guru.

Rendahnya penguasaan materi sangatlah berpengaruh terhadap peserta didik karena mereka mendapatkan materi dari guru. Meskipun peserta didik memiliki buku, namun guru sangat berperan dalam membangun karakter dan keilmuan peserta didik. Guru Pendidikan Pancasila yang bukan linier memiliki kelemahan dalam menyampaikan materi. Menurut Putri, Chotimah, dan Faisal (2016) menunjukkan bahwa guru PPKn non-lulusan PPKn memiliki pemahaman yang terbatas dalam aspek normatif dan filosofis mata pelajaran, seperti pemahaman UUD 1945, nilai Pancasila, dan konsep kewarganegaraan aktif. Akibatnya, siswa tidak memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu peserta didik. Ujarnya penyampaian materi dari guru kurang mendalam sehingga terkadang membuat ia bosan.

Kompetensi guru sangat menentukan dalam memberikan materi kepada peserta didik. Seorang guru yang kurang memahami materi dikhawatirkan tidak memberikan pemahaman kepada peserta didik. Lebih jauhnya lagi seorang guru justru memberikan materi yang salah kepada peserta didik sehingga melenceng dari tujuan pembelajaran. Guru yang berkompeten akan meningkatkan indikator kualitas pembelajaran dengan perilaku dan dampak siswa, iklim pembelajaran, materi serta media pembelajaran (Haryati, T, dan Rochman, 2012)

Dampak lain kurangnya guru linier Pendidikan Pancasila yaitu metode pembelajaran yang cenderung monoton. Menurut Wirabumi (2020), metode pembelajaran merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam konteks kegiatan belajar mengajar (KBM). Dalam wawancara terhadap salah satu peserta didik, ia mengatakan bahwa metode pembelajaran Pendidikan Pancasila cenderung monoton dengan metode ceramah. Peserta didik disuruh untuk melihat buku dan mendengarkan penjelasan guru yang hanya menulis catatan kecil di papan tulis. Metode tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu terbatasnya penguasaan materi oleh siswa, munculnya verbalisme, serta rendahnya tingkat keaktifan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran (Sanjaya, 2020).

Metode pembelajaran ini berpengaruh juga terhadap motivasi dan semangat peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Pancasila yang diajarkan menggunakan metode yang menarik akan menambah motivasi peserta didik. Sebaliknya, ketika guru tidak menggunakan metode yang menarik ditambah lagi dengan rendahnya pemahaman materi oleh guru membuat peserta didik mengalami kejenuhan akademik (*academic burnout*). Ada tiga dimensi dari *academic burnout* ini yaitu *exhaustion* (kelelahan), *cynicism* (sikap sinis), dan *professional efficacy* (efektivitas profesional) (Schaufeli dkk, 2022). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa 70% peserta didik mengalami *academic burnout* ditandai dengan perasaan bosan, sering merasa lelah, dan merasa tidak bisa belajar dengan baik dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Dampak dari hal ini tentu sangatlah negatif dan berkaitan dengan keberhasilan peserta didik.

Dampak terakhir yang ditimbulkan dari kurangnya guru Pendidikan Pancasila adalah rendahnya kualitas Pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan sektor pendidikan untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan penempatan guru agar sesuai dengan keahlian mereka. Jika masalah ini tidak segera diatasi, generasi muda Indonesia berisiko tumbuh dengan pengetahuan kewarganegaraan yang dangkal, keterampilan sosial yang lemah, serta karakter yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Nissa, S. M., Hasibuan, M. A., & Fadhilah, A., 2024). Selain itu, rendahnya profesionalisme guru yang ditandai dengan kurangnya guru linier berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran. Dalam tinjauan penelitian Wibowo (2020) disebutkan bahwa guru yang kurang memiliki keterampilan linier cenderung menggunakan metode pengajaran pasif, gagal melibatkan siswa dalam diskusi kritis, dan gagal mengintegrasikan isu-isu terkini ke dalam pembelajaran kewarganegaraan. Banyaknya dampak yang ditimbulkan harus menjadi kewaspadaan dalam proses pembelajaran.

B. Solusi dari kurangnya guru linier Pendidikan Pancasila

Sebuah permasalahan tidak akan datang tanpa disertai solusi. Setiap tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya terkait ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila, tentu dapat diatasi melalui berbagai solusi. Kurangnya guru Pendidikan Pancasila yang linier dari jurusan PPKn berkaitan dengan terbatasnya lulusan dan jurusan dari PPKn itu sendiri. Kampus yang memiliki jurusan PPKn sangatlah terbatas sehingga lulusannya pun terbatas. Selain itu, permasalahan lainnya terdapat pada minat peserta didik yang cenderung memandang sebelah mata jurusan PPKn karena dianggap tidak menawarkan prospek karier yang menarik dibandingkan dengan jurusan lain seperti MIPA, Bahasa Inggris, atau Teknologi Informasi.

Solusi yang dapat ditawarkan adalah meningkatkan minat terhadap mata Pelajaran Pendidikan Pancasila sejak kecil. Nilai-nilai Pendidikan Pancasila dapat dikenalkan sejak kecil dan dalam ruang lingkup keluarga sehingga anak-anak memiliki minat terhadap mata Pelajaran ini yang nantinya akan mendalami ilmu PPKn lebih dalam lagi. Minat yang tinggi terhadap jurusan PPKn akan membuat lulusannya semakin banyak dan akan berpengaruh terhadap keberadaan dan regenerasi guru Pendidikan Pancasila di sekolah. Selain itu, menarik alumni sekolah yang mengambil jurusan PPKn di kampus bisa menjadi sarana dan rekrutmen guru untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan di sekolah tersebut.

Solusi lainnya ketika tidak ada lagi guru yang linier dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan kompetensi guru yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam mengajar Pendidikan Pancasila. Kisworo (2017) menyatakan bahwa peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan atau pihak sekolah, mempelajari literatur maupun referensi daring, serta aktif dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Semakin banyak pelatihan yang dilakukan

akan semakin baik dan memiliki kompetensi yang diperlukan oleh guru mata Pelajaran Pendidikan Pancasila.

Pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru yang sudah terlanjur mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dapat menjadi solusi yang bertujuan untuk memberikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sesuai standar guru PKn, memberikan sertifikasi pendidik yang resmi agar guru dapat mengajar secara legal dan diakui, dan memfasilitasi guru dari latar belakang lain seperti IPS, Sejarah, atau bahkan guru SD yang sudah mengajar PKn namun belum linier (Permenbudristek, 2022). Kompetensi guru dapat terasah dan terlatih dalam program tersebut dan mendapatkan sertifikasi untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

Dari segi kampus, diperlukan penguatan Program Studi PKn di Perguruan Tinggi Mendorong kampus-kampus LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) untuk membuka atau memperbanyak program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman (UPI, 2023). Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan usulan dan menggagas kepada Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kampus terdekat dari Kabupaten Tasikmalaya untuk membuat Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kampus daerah Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Pendidikan memegang peranan vital dalam membentuk individu yang siap berkontribusi dalam masyarakat, di mana guru menjadi komponen kunci dalam proses pembelajaran. Selain sebagai pendidik, guru juga memiliki fungsi sebagai teladan bagi peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Pancasila, pentingnya peran guru yang memiliki kompetensi linier menjadi perhatian khusus, terutama di MTs Negeri 1 Tasikmalaya. Jumlah guru Pendidikan Pancasila yang linier di sekolah tersebut hanya satu orang. Faktor penyebab dari masalah ini yaitu keterbatasan guru, anggapan terhadap guru Pendidikan Pancasila yang dapat diajarkan oleh siapapun, dan belum meratanya pelaksanaan PPG. Kurangnya guru tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pembelajaran. Rendahnya penguasaan materi, metode pembelajaran yang cenderung monoton, dan rendahnya kualitas Pendidikan Pancasila di Indonesia menjadi dampak baik bagi sekolah ataupun bagi peserta didik. Solusi yang dapat ditawarkan dalam masalah ini yaitu meningkatkan minat terhadap Pendidikan Pancasila sejak kecil, memperbanyak melakukan pelatihan dan kompetensi guru, mengikuti PPG dan penguatan program studi PPKn di berbagai kampus agar bisa dengan mudah dijangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, C. (2020). *Problematika Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Pendidikan*. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. <https://disdik.purwakartakab.go.id>
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. The Macmillan Company.
- Driyarkara, N. (2006). *Pendidikan: Filsafat dan Praktiknya*. Gramedia.
- Febriana, R. (2021). *Kompetensi guru*. Bumi aksara
- Hamdani, D, A., & Dewi, A, D. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kehidupan Bersosialisasi dan Membangun Karakter Bangsa pada Siswa Sekolah Dasar*
- Harahap, K. S., Sintia, L., & Siagian, E. A. (2024). Solusi Atas Kesulitan Guru dalam Mengajarkan Materi PKN di SD. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(4), 428–431.
- Haryati, T., & Rochman, N. (2012). Peningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui praktik belajar kewarganegaraan (Project citizen). *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Indrawati, E. S., & Nurpatri, Y. (2022). *Problematika pembelajaran ipa terpadu (kendala guru dalam*

- pengajaran ipa terpadu). *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 226-234.
- Jahidi, J. (2013). Kualifikasi dan Kompetensi Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan Unigal*, 1(1), 23-30. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/adpen/article/download/189/181?utm>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kisworo, K., Ngabekti, S., & Indriyanti, D. (2017). Faktor Determinan dari Guru dalam Implementasi Pembelajaran IPA Terpadu Tingkat SMP di Wonosobo. *Journal of Innovative Science Education*, 6(2), 179-185. <https://doi.org/10.15294/jise.v6i2.19716>
- Kusmarni, Y. (2012). Studi kasus. *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2, 1-12.
- Melfianora, M., & Si, M. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 12(1), 14-26.
- Mufidah, N. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Dalam Mewujudkan Smart And Good Citizen. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 259-269.
- Nissa, S. M., Hasibuan, M. A., & Fadhilah, A. (2024). Kelemahan di Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Putri, T. S., Chotimah, U., & Faisal, E. E. (2016). Kompetensi Profesional Guru PKn. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 3(1). Diakses dari: <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4574>
- Rahayu, M. (2007). Pendidikan kewarganegaraan. Grasindo
- Sanjaya, W. (2010). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Schaufeli, W., Martínez, I., Pinto, A., Salanova, M., dan Bakker, A. 2022. Burnout and Engagement in University Students: A Cross-National Study. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33 (5):464-481.
- Siroj, R. A., Afgani, W., Fatimah, F., Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 11279-11289.
- Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. Bandung: alfabeta, 288.
- Surahmad, Winarno. (2004). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung: Tarsito
- Tilaar, H. A. R. (2012). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025
- Universitas Pendidikan Indonesia. (2023). Rencana Strategis Pengembangan Kampus UPI Tasikmalaya 2023–2027. Bandung: UPI Press.
- UU No 20 Tahun 2023 Tentang Sisdiknas
- Wibowo, A. (2020). "Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah". *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 123-132. <https://doi.org/10.21831/civics.v17i2.31245>
- Wirabumi, R. (2020, October). Metode pembelajaran ceramah. In *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)* (Vol. 1, No. 1, pp. 105-113).
- Yestiani, D.K & Zahwa, Nabila. (2020). Peran Guru dalam Pembelajaran pada Siswa
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2022). Pendidikan formal, Pendidikan non formal Dan Pendidikan informal. *PEMA*, 2(2), 125-131.